

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan ketenagakerjaan belum sepenuhnya terstruktur dengan baik. Perhatian terhadap sektor ketenagakerjaan dimulai pada masa awal pemerintahan Indonesia untuk menghadapi tantangan pembangunan pasca-kemerdekaan, di mana banyak sektor yang membutuhkan tenaga kerja untuk membangun infrastruktur dan mendukung perekonomian negara.

Pada tahun 1945, Indonesia merdeka dan dalam upaya pembangunan negara, sektor ketenagakerjaan mulai menjadi fokus. Beberapa peraturan dasar tentang tenaga kerja mulai diterapkan, termasuk pendirian lembaga atau dinas yang mengelola masalah ketenagakerjaan.

Pada tahun 1950-an, Indonesia menghadapi masalah ketimpangan pembangunan antara daerah pusat (Pulau Jawa) dan daerah terpencil lainnya. Salah satu solusi yang diusulkan adalah program transmigrasi yang bertujuan untuk meratakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di luar Pulau Jawa dengan memindahkan sebagian penduduk dari daerah padat penduduk ke wilayah yang kurang berkembang. Program transmigrasi dimulai pada era pemerintahan Presiden Sukarno pada tahun 1950-an, dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dan Bali, serta memanfaatkan potensi sumber daya alam di daerah terpencil untuk meningkatkan produksi pertanian.

Pada awalnya, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Transmigrasi adalah dua instansi terpisah yang memiliki fokus yang berbeda, meskipun keduanya berhubungan erat dalam konteks pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan. Namun, untuk lebih efisien dalam pengelolaan

dan pelaksanaan kebijakan, kedua dinas ini akhirnya digabungkan. Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bertujuan untuk menciptakan pengelolaan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang lebih terpadu dan terkoordinasi, baik di tingkat nasional maupun daerah.⁴⁶

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans trans) merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan. Tugas pokok Disnakertrans adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, yang meliputi pengembangan ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, serta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2016). Dalam menjalankan tugasnya, Disnakertrans berperan penting dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan yang ada di provinsi Bengkulu.

Tugas utama dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu adalah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan dengan mencari dan mempertemukan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Beberapa tugas yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu antara lain: Penyusunan kebijakan ketenagakerjaan di daerah setempat, termasuk program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja.

- 1) Pengawasan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan ketenagakerjaan, seperti upah minimum, waktu kerja, dan kesehatan dan keselamatan kerja.
- 2) Menyediakan informasi tentang lapangan kerja dan peluang karir bagi pencari kerja.

⁴⁶ Sejarah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dikutip https://disnakertransmerauke.id/sejarah/?utm_source=chatgpt.com,
sabtu, 24 Mei 2025, pukul 11.55 WIB

- 3) Membuat perjanjian kerjasama dengan perusahaan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi warga setempat.
- 4) Membantu mengurus izin kerja bagi tenaga kerja asing yang ingin bekerja di daerah setempat.
- 5) Menangani permasalahan ketenagakerjaan seperti PHK, dan konflik industrial.
 - **Program dan Kegiatan Unggulan**
 - a) Pelatihan Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK)
 - b) Program Pemagangan ke Jepang
 - c) Job Fair Provinsi Bengkulu
 - d) Sosialisasi Norma Hubungan Industrial
 - e) Pendataan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - f) Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan
 - g) Pemberdayaan Masyarakat Transmigran.⁴⁷

B. Visi Dan Misi Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

1. Visi Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigran yang Produktif, Berdaya saing Mandiri dan Sejahtera.
2. Misi Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
 - a. Perencanaan tenaga kerja
 - b. Penyusunan dan pengembangan sistem informasi pasar kerja online dan offline
 - c. Pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sektoral, regional dan luar negeri.
 - d. Pembinaan hubungan industrial, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja

⁴⁷ <https://chatgpt.com/share/6827590c-0ccc-8005-879f-494068da84ad>
diakses pada tanggal 18 Mei 2025, Pukul 11.46

- e. Pengembangan keahlian sumber daya manusia pencari kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja
- f. Membangun kawasan transmigrasi yang memenuhi catur layak⁴⁸.

Struktur organisasi di Bidang Hubungan Industrial (HI) Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu

Umumnya terdiri dari beberapa unit yang saling berkoordinasi untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Berikut adalah gambaran umum dari struktur tersebut:

1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan

Memimpin keseluruhan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan termasuk bidang hubungan industrial dan bertanggung jawab atas kebijakan dan pengambilan keputusan strategis.

2. Kepala Bidang Hubungan Industrial

Memimpin dan mengelola semua aspek yang berkaitan dengan hubungan industrial dan mengkoordinasikan kegiatan mediasi, konsiliasi, dan penyuluhan.

3. Unit Mediasi dan Penyelesaian Sengketa

Bertugas melakukan mediasi antara pekerja dan pengusaha dalam sengketa yang berkaitan dengan PHK dan masalah hubungan kerja lainnya dan menyusun laporan hasil mediasi dan rekomendasi penyelesaian.

⁴⁸ <https://nakertrans.bengkuluprov.go.id> diakses pada tanggal 18 Mei 2025, Pukul 11.46.

4. Unit Pengawasan dan Penegakan Hukum

Mengawasi pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan.

5. Unit Penyuluhan dan Edukasi

Melaksanakan program penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Dan menyediakan pelatihan terkait ketenagakerjaan dan penyelesaian sengketa.

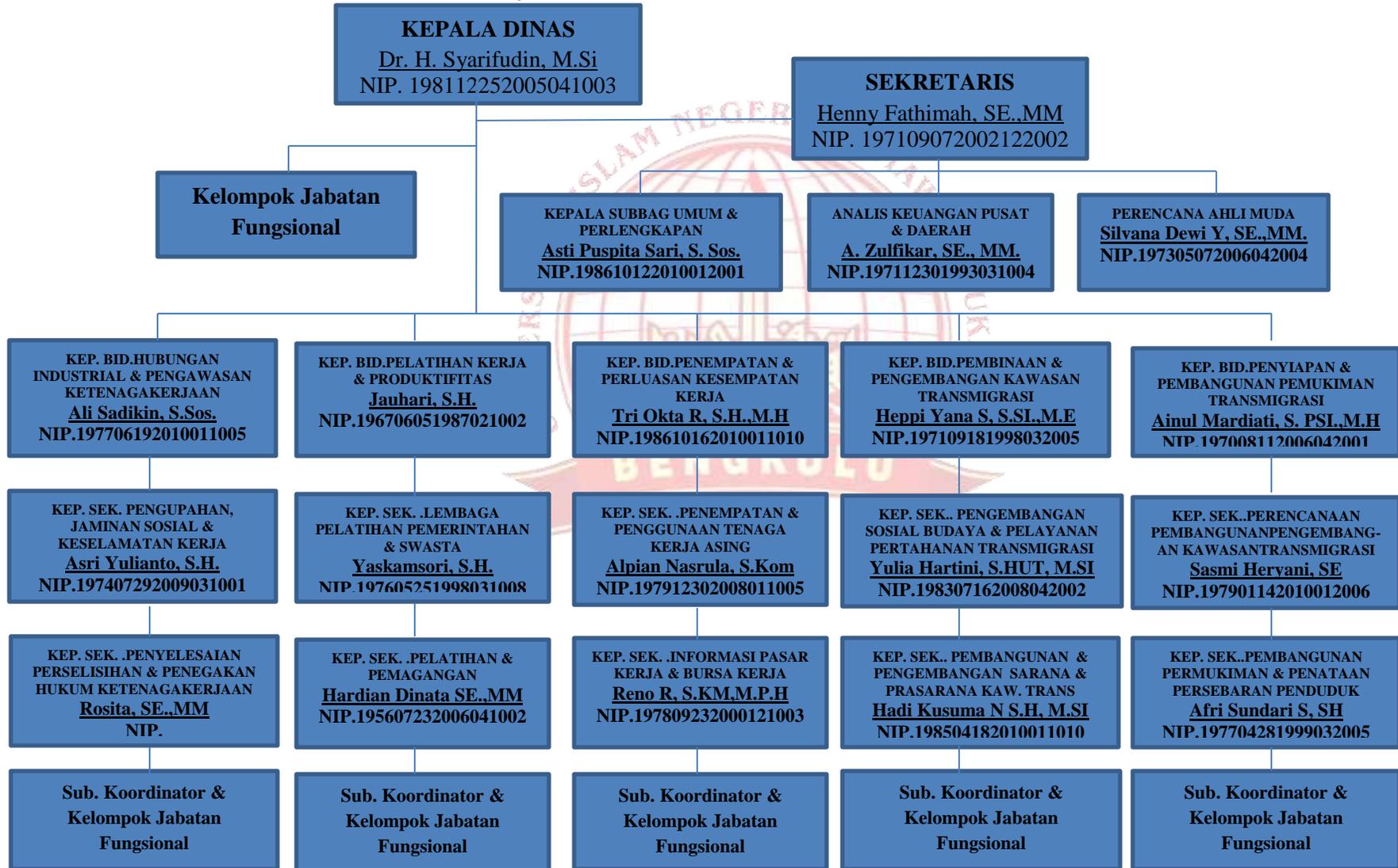
6. Unit Data dan Informasi

Mengumpulkan dan menganalisis data terkait hubungan industrial, termasuk kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan program.

7. Staf Administrasi

Mendukung seluruh kegiatan di bidang hubungan industrial melalui pengelolaan administrasi dan kegiatan operasional unit-unit lain.

C. STRUKTU DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU



Struktur Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

Sumber: dokumentasi peneliti